

Pembentukan SAI20 untuk Menjawab Tantangan Global

Pandemi Covid-19 yang berskala global telah memukul perekonomian di berbagai negara dan meningkatkan risiko fraud karena implementasi program-program pemerintah untuk menanganinya.

Bencana ini juga memperlebar ketimpangan di berbagai negara dan menghambat upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Selain dampak pandemi yang terus berlanjut, berbagai tantangan juga semakin meningkat di masa depan; risiko pemulihan ekonomi global akibat gangguan pasokan, tekanan inflasi yang meningkat, tekanan keuangan, munculnya krisis energi, potensi bencana terkait iklim, meningkatnya ketidakstabilan global, dan melemahnya pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah di berbagai negara mencoba melakukan perbaikan arsitektur kesehatan global; termasuk melalui pendekatan One Health. Pemerintah juga berupaya mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan ketahanan dan stabilitas sektor bisnis, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, upaya menjaga stabilitas keuangan global dari dampak perubahan iklim dilakukan dengan mengembangkan agenda keuangan hijau. Pemerintah G20 juga perlu menjadi katalis untuk mendorong transformasi digital yang aman dan berkelanjutan, terutama pada sektor keuangan.

Situasi ketidakpastian, kompleksitas geopolitik, perubahan lingkungan yang cepat, dan tantangan yang muncul saat ini bertepatan dengan Kepresidenan G20 Indonesia tahun 2022. Dengan mempertimbangkan lingkungan saat ini, dirumuskan tiga prioritas utama kepresidenan G20 Indonesia, yaitu: arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan kata lain, pemerintah G20 diharapkan terus mengambil peran dalam membantu memastikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19 serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Bagaimanapun, upaya pemulihan yang diprakarsai oleh pemerintah G20 harus ditopang oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Supreme Audit Institution (SAI) di masing-masing negara G20 dapat menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan eko-

sistem akuntabilitas, sebelum, pada saat, dan pascakrisis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya pencapaian agenda 2030.

SAI dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran sentral untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tata kelola sektor publik dan keberlanjutan sektor usaha untuk membantu resiliensi negara menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan.

PENTINGNYA PEMBENTUKAN SAI20

SAI negara-negara G20 perlu merespons pandemi dan membantu pemerintah dengan memberikan wawasan yang independen dan obyektif serta tepat waktu. SAI perlu memberikan informasi yang relevan yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah. SAI perlu membantu pemerintah masing-masing dengan menyoroti potensi risiko dan dampak yang timbul dari respons terhadap pandemi untuk memberikan hasil kebijakan publik terbaik, memastikan terselenggaranya pelayanan publik, serta berkontribusi pada *reviu* atas implementasi SDGs.

Sejalan dengan resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum Persekutuan Bangsa-Bangsa tahun 2011 untuk mempromosikan efisiensi, akuntabilitas, efektivitas dan transparansi administrasi publik dengan memperkuat Supreme Audit Institution, dan prinsip International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) untuk memberikan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat, SAI perlu menunjukkan relevansinya terhadap warga negara, pemerintah, lembaga perwakilan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan kepresidenan Indonesia pada G20 tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan memprakarsai pembentukan Supreme Audit Institution (SAI) negara-negara G20, yang akan mengadakan KIT pertama pada 29–30 Agustus 2022.

Pembentukan SAI20 bertujuan agar komunitas SAI menjadi bagian dari komunitas global, responsif terhadap harapan pemangku kepentingan, dengan memberikan wawasan yang independen dan



Dr. Isma Yatus CSFA, CFA
Ketua SAI20/Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.

objektif, serta informasi yang tepat waktu dan relevan. Inisiatif ini merupakan komitmen kolektif untuk berkontribusi terhadap upaya internasional mengatasi tantangan global saat ini, sehingga SAI20 merumuskan dua prioritas utama, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung SDGs.

Untuk mencapai tujuan ini, para anggota SAI20 bertemu sepanjang 2022, berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara negara-negara G20 dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk memperkuat pengawasan (*oversight*), mengembangkan wawasan kebijakan (*insight*), dan memberikan pandangan ke depan (*foresight*) untuk mendorong tata kelola dan kebijakan yang akuntabel.

Pembentukan SAI20 merupakan langkah awal untuk meningkatkan nilai dan manfaat SAI untuk mendukung G20. Sebagai SAI negara-negara anggota G20 kami berkomitmen, meskipun mandat dan respons terhadap pandemi dari masing-masing SAI mungkin berbeda, membantu pemerintah mengidentifikasi risiko, dampak, dan kemungkinan respons untuk memberikan hasil kebijakan publik yang lebih baik dan mendorong perbaikan tata kelola, serta berkontribusi pada *reviu* atas implementasi SDGs.

SAI20, baik di tahun pertama ini maupun masa mendatang, dapat meningkatkan ekosistem akuntabilitas dalam kerangka tata kelola G20, serta menggemakan (*echoing*) dan menyuarakan (*voicing*) inisiatif komunitas INTOSAI kepada berbagai pihak yang lebih luas.

Dengan berkumpul bersama, kami dapat mengeksplorasi peluang kerja sama dan kolaborasi yang efektif untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan merumuskan rekomendasi sebagai solusi terhadap situasi global saat ini.

Keterlibatan *multi-stakeholder* untuk pulih lebih kuat, bersama-sama SAI dapat memainkan peran penting sebagai lembaga independen eksternal, untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi administrasi publik.

Sejalan dengan prioritas kepresidenan G20 dan SAI20 saat ini, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inklusivitas pemulihan ekonomi

yang menguntungkan semua pihak, kami mendukung para pemimpin G20 dengan mendorong tata kelola yang baik dan membantu mengidentifikasi potensi risiko, dampak, dan kemungkinan respons terhadap pandemi serta berkontribusi pada *reviu* implementasi SDGs.

Sebagai kelompok baru, kami juga menyoroti pentingnya keterlibatan *multi-stakeholder* untuk mengatasi isu-isu global. Misalnya melalui penyusunan kerangka pelaporan keberlanjutan — *environment, social, and governance* (ESG) bagi sektor publik menuju ekonomi yang lebih hijau, terutama dalam proses transisi energi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Perbaikan atas seluruh bidang prioritas G20 dapat diwujudkan melalui dialog dan kerja sama yang intens antar pemerintah dan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan hasil kebijakan publik yang lebih baik dan mewujudkan *good governance* serta memastikan *no one left behind*. Oleh karena itu, SAI20 meminta pemerintah G20 untuk bekerja secara kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan untuk memberikan nilai tambah bagi komunitas global dalam rangka membangun tata kelola yang lebih tangguh.

SAI mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dan kompleks di masa depan dalam upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi kebijakan program-program pemerintah. SAI20 mendorong kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menjalankan pengawasan serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, melalui kekuatan pengawasan (*oversight*), pengembangan wawasan kebijakan (*insight*), dan pandangan ke depan (*foresight*). Dengan demikian, kita dapat berperan aktif mendorong prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pada administrasi publik. Melalui semangat *Recover Together, Recover Stronger*, pembentukan SAI20 diharapkan dapat membantu memastikan keberhasilan G20.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga dilengkapi foto terbaru. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail redaksi@bisnis.com.